



Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

2%

SIMILARITY INDEX

Submission author: Rina Juwita
Assignment title: Tulisan 1
Submission title: Rasionalitas Publik di Pilkada
File name: pdf_Rasionalitas_Publik_di_Pilkada...
File size: 80.72K
Page count: 3
Word count: 844
Character count: 5,704
Submission date: 17-Feb-2021 11:18AM (UTC+0700)
Submission ID: 1511271746

Rasionalitas Publik di Pilkada

ADVERTISEMENT

PROKAL.CO

CATATAN: RINA JUWITA*

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak semakin mendekati saat yang menentukan. Tahapan demi tahapan pemilihan langsung pada 27 Juni terus dilalui oleh 171 daerah termasuk Kaltim. Itu untuk menentukan para pemimpin daerah lima tahun ke depan.

Pilkada ini merupakan fase kritis pembuktian reliabilitas proses demokrasi elektoral pada masa sekarang dan masa mendatang, apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Maka, penting kiranya diperhatikan bahwa manajemen pemilu kali ini harus berhasil, tidak hanya dalam konteks prosedur tapi juga substansinya.

ADVERTISEMENT

Pelaksanaan pilkada serentak benar-benar merupakan perayaan nasional untuk mewujudkan transformasi historis, konsolidasi demokrasi dari level regional menuju level nasional. Maka, pilkada kali ini harus bisa merefleksikan kesukarelaan dan juga partisipasi masyarakat dalam politik.

Robert A Dahl, profesor ilmu politik dari Yale University, menekankan dua variabel penting dalam demokrasi. Yaitu, adanya kontestasi dan partisipasi. Hal ini menyiratkan, kualitas demokrasi pilkada tidak hanya ditentukan oleh para kandidat yang bertarung, tapi juga tingkat partisipasi publik.

Salah satu elemen penting yang harus dipahami semua pihak yang terlibat dalam pesta rakyat ini adalah komunikasi yang baik untuk menghindari konflik. Baik itu sebelum, ketika, dan setelah pilkada berlangsung.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan semua pasangan calon (paslon) harus bisa membangun komunikasi secara intensif satu sama lain. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan prinsip *mutual understanding* atau saling pengertian.

Sehingga nantinya, mereka yang tidak memenangkan pilkada ini tidak berkecil hati dan mampu menyalurkan ekspresi kekecewaan mereka melalui saluran yang tepat, sesuai aturan. Misalnya, kandidat yang merasa mengalami kecurangan oleh lawan tandangnya bisa secara bijak melayangkan protes. Yaitu mengajukan keberatan di pengadilan. Di mana bukti dan fakta merupakan aspek penting dalam penyelesaian perselisihan.

Sebaliknya, ujaran kebencian seperti provokasi, fitnah, dan pencemaran nama baik merupakan hal yang bersifat kontraproduktif. Maka harus disadari bersama, bahwa itu hanya akan memicu konflik dan tindakan kriminal yang merugikan semua pihak.